

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penulisan

Dalam dekade terakhir, dunia menghadapi krisis energi dan perubahan iklim yang semakin nyata. Pemanasan global akibat emisi gas rumah kaca, khususnya dari bahan bakar fosil, telah mendorong berbagai negara untuk beralih pada sumber terbarukan. Menurut laporan *International Energy Agency* (IEA), sektor energi menyumbang hampir 75% dari total emisi karbon global, sehingga transisi menuju energi rendah karbon menjadi keharusan mendesak bagi banyak negara.¹ Hal ini menegaskan bahwa energi terbarukan sangat dibutuhkan untuk memenuhi sumber energi tersebut. Energi terbarukan seperti tenaga surya, angin, biomasa, dan panas bumi (geotermal) dipandang sebagai solusi strategis untuk memenuhi kebutuhan energi sekaligus menjaga keberlanjutan lingkungan. Dari semua sumber energi ini, panas bumi memiliki keunggulan karena mampu menyediakan energi bersih dengan faktor kapasitas tinggi dan ketersediaan yang stabil sepanjang tahun. Laporan *Intergovernmental Panel on Climate Change* (IPCC) menegaskan bahwa pemanfaatan energi panas bumi dapat menjadi salah satu cara paling efektif untuk mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil sekaligus meningkatkan keamanan energi.² Dengan demikian hal tersebut dapat menegaskan bahwa energi panas bumi dipandang sebagai salah satu cara paling efektif untuk mengurangi emisi karbon yang berlebihan.

Sektor energi terbarukan dan panas bumi menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sebagian besar warga dunia seiring dengan kemajuan teknologi, perkembangan globalisasi dan pertumbuhan ekonomi global. Dunia sekarang ini semakin gencar membangun pembangkit listrik yang bersumber pada energi terbarukan. Kebutuhan terhadap energi yang berkelanjutan dan rendah emisi karbon menjadi sebuah keharusan. Dari berbagai macam sumber energi, panas bumi

¹ International Energy Agency, *World Energy Outlook 2023* (Paris: IEA, 2025). hlm. 17.

² Intergovernmental Panel on Climate Change, *AR6 Climate Change 2023: Mitigation of Climate Change* (Geneva: IPCC, 2023). hlm. 28.

geotermal merupakan salah satu yang dilihat sebagai sumber yang memenuhi kriteria tersebut.

Indonesia menjadi salah satu dari sekian banyak negara yang turut serta berpartisipasi dalam pengembangan geotermal sebagai energi terbarukan. Indonesia dikenal sebagai negara dengan cadangan panas bumi terbesar kedua di dunia setelah Amerika Serikat. Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mencatat bahwa potensi panas bumi Indonesia mencapai sekitar 23,7 GW. Namun baru sekitar 2.3 GW yang dimanfaatkan hingga tahun 2023.³ Di sisi lain, Indonesia menghadapi tantangan untuk memenuhi target bauran energi terbarukan sebesar 23% pada tahun 2025 sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Umum Energi Nasional (RUEN).⁴ Oleh karena itu, pemerintah gencar mendorong eksplorasi dan pembangunan proyek Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) di berbagai daerah. Indonesia juga menempati posisi unik dalam lanskap pengembangan energi terbarukan dalam tingkat global karena memiliki potensi panas bumi yang sangat besar dan tersebar secara geografis di seluruh wilayah kepulauan. Hingga tahun 2025, negara ini secara resmi menduduki peringkat kedua dunia dalam kapasitas terpasang Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) setelah Amerika Serikat.⁵ Potensi ini bukan hanya bersifat teknis ataupun ekonomis, melainkan juga strategis dalam konteks transisi energi, pengurangan emisi, dan pemenuhan kebutuhan listrik nasional.

Menurut data resmi dari Asosiasi Panas Bumi Indonesia (INAGA), hingga periode terkini terdapat sekitar 342 lokasi panas bumi yang telah diidentifikasi di seluruh Indonesia. Dari jumlah ini, sekitar 70 *Working Areas* (WKP) telah

³ Republik Indonesia, “Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 9 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 16 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.” dalam *Database Peraturan JDIH BPK* <https://peraturan.bpk.go.id/Details/265976/permen-esdm-no-9-tahun-2023>, diakses pada 27 Juli 2025

⁴ Presiden Republik Indonesia, “Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2017 tentang Rencana Umum Energi Nasional (RUEN),” dalam *Peraturan Perundang-undangan Perpres 2017*, <https://peraturan.bpk.go.id/Details/68772>, diakses pada 27 Juli 2025.

⁵ Rahmad Nasution, “Indonesia ranks second globally in geothermal energy capacity,” ANTARA News, 17 Sept 2025, https://en.antaranews.com/news/380545/indonesia-ranks-second-globally-in-geothermal-energy-capacity?utm_source=chatgpt.com, diakses pada 21 September 2025.

ditetapkan sebagai zona pengembangan.⁶ Potensi sumber daya panas bumi tersebar mulai dari pulau Sumatera, Jawa, Sulawesi, Nusa Tenggara, hingga Papua dengan konsentrasi tinggi di zona vulkanik yang berderet sepanjang Sirkum Pasifik. Meskipun demikian, pemanfaatan aktual masih tergolong sangat rendah bila dibandingkan dengan total potensi. Data terbaru menyebutkan bahwa kapasitas terpasang tingkat nasional telah mencapai 2.744 MW (2,744MW) dan potensi total sekitar 23.742 MW.⁷ Lebih lanjut berdasarkan makalah konferensi terkini, hingga tahun 2022 kapasitas terpasang PLTP di Indonesia mencapai sekitar 2.334,7 MW.⁸ Pemerintah kemudian menetapkan target ekspansi yang lebih ambisius, misalnya dari data April 2025 terlihat bahwa pada RUPTL dimaksudkan tambahan kapasitas sekitar 5,2 GW dalam sepuluh tahun ke depan.⁹ Secara lebih luas, laporan menyebut bahwa Indonesia memiliki sumber daya panasbumi yang dapat dieksploitasi secara komersial sebesar $\pm 23\text{-}29$ GW (23.000-29.000 MW).¹⁰ Jika target tercapai, maka pemanfaatan geotermal akan menjadi bagian penting dari struktur pasokan listrik nasional serta kontribusinya terhadap energi bersih akan meningkat.

Lebih lanjut, Indonesia juga merupakan negara yang memiliki posisi strategis, terletak dalam wilayah tumbukan lempeng tektonik dan garis khatulistiwa membuat negara ini memiliki cadangan energi yang sangat besar. Selama bertahun-tahun hal ini membawa Indonesia menjadi salah satu negara yang bergantung pada laku industri ekstraktif. Hal tersebut menjadikan negara Indonesia masuk ke dalam

⁶ Aditya Eko Sigit Wicaksono, "Govt aims to increase installed geothermal capacity by 5.2 GW", *ANTARA News*, 14 Apr 2025, https://en.antaranews.com/news/351665/govt-aims-to-increase-installed-geothermal-capacity-by-52-gw?utm_source=chatgpt.com, diakses pada 21 September 2025.

⁷ Rahmad Nasution, "Indonesia ranks second globally in geothermal energy capacity," *ANTARA News*, 17 Sept 2025, https://en.antaranews.com/news/380545/indonesia-ranks-second-globally-in-geothermal-energy-capacity?utm_source=chatgpt.com, diakses pada 21 September 2025.

⁸ Asosiasi Panasbumi Indonesia, "Country Update: Geothermal as The Backbone of Energy Security in Indonesia's Energy Transition", dalam *INAGA*, <https://inaga-api.or.id/geothermal-potency/workingarea>, diakses pada 27 Juli 2025.

⁹ Aditya Eko Sigit Wicaksono, "Govt aims to increase installed geothermal capacity by 5.2 GW", *ANTARA News*, 14 Apr 2025, https://en.antaranews.com/news/351665/govt-aims-to-increase-installed-geothermal-capacity-by-52-gw?utm_source=chatgpt.com, diakses pada 21 September 2025.

¹⁰ Asosiasi Panasbumi Indonesia, "Update on Geothermal Development Status and Working Areas Potential in Indonesia", dalam *INAGA*, <https://inaga-api.or.id/geothermal-potency/workingarea>, diakses pada 27 Juli 2025.

sepuluh besar negara dengan jumlah pengeluaran emisi terbesar di dunia.¹¹ Berkaca pada fakta ini, maka dapat dilihat bahwa upaya mendorong pembangkit listrik yang rendah emisi karbon telah menjadi suatu keharusan bagi Negara Indonesia.

Namun, proyek geotermal di Indonesia tidak pernah sepenuhnya bebas dari persoalan. Di berbagai daerah, pembangunan proyek panas bumi justru memunculkan konflik sosial, ekologis, ekonomi, dan budaya. Umumnya masyarakat lokal menilai bahwa proyek geotermal berpotensi merusak lingkungan hidup, mengancam tanah ulayat, mengurangi sumber air, serta mengganggu keseimbangan ekologis dan kehidupan sosial masyarakat adat. Situasi ini memperlihatkan bahwa pembangunan energi terbarukan tidak selalu identik dengan keadilan ekologis. Dalam beberapa kasus, proyek energi yang diklaim sebagai “energi hijau” justru menimbulkan persoalan sosial baru di tingkat lokal. Konflik seperti ini tampak jelas di berbagai lokasi, termasuk Wae Sano, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Gunung Talang, Kabupaten Solok, Provinsi Sumater Barat dan Poco Leok di Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur. Penolakan masyarakat terhadap proyek geotermal umumnya berkaitan dengan persoalan tanah adat, kurangnya partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan, kekhawatiran terhadap kerusakan lingkungan, serta ancaman terhadap identitas budaya masyarakat lokal. Dalam konteks ini, konflik pembangunan tidak lagi sekadar persoalan teknis atau ekonomis, tetapi juga menyangkut relasi kuasa, hak masyarakat adat, keadilan sosial, dan keberlanjutan ekologis.

Flores merupakan salah satu pulau di Nusa Tenggara Timur yang memiliki cadangan panas bumi yang cukup besar. Data kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menunjukkan bahwa total potensi panas bumi di Flores mencapai lebih dari 1.000 MW, tersebar di berbagai titik seperti Ulumbu, Wae Sano, dan Poco Leok.¹² Namun, setiap upaya pengembangan selalu menghadapi perlawanan dari masyarakat. Rencana pembangunan proyek geotermal di Poco Léok, Kabupaten

¹¹ Wishnu Try Utomo dkk., *Geothermal Di Indonesia Dilema Potensi Dan Eksploitasi Atas Nama Transisi Energi*, (Jakarta: CELIOS dan WALHI, 2024). hlm. 2.

¹² Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, *Buku Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi* (Jakarta: Ditjen EBTKE, 2021). hlm. 9-10.

Manggarai, Nusa Tenggara Timur, memicu kontroversi besar sejak 2022. Proyek ini juga telah memicu berbagai kontroversi yang signifikan, terutama terkait dampaknya terhadap masyarakat lokal. Dalam upaya untuk memenuhi kebutuhan energi yang semakin meningkat, proyek ini sering kali dihadapkan pada konflik antara kepentingan pembangunan dan keberlangsungan hidup masyarakat sekitar. Hal ini dapat dibuktikan oleh kejadian demonstrasi yang berlangsung pada hari Rabu, 2 Oktober 2024. Aksi unjuk rasa yang dipelopori tokoh masyarakat adat ini, bertujuan untuk menolak proyek geotermal di Poco Leok, Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur (NTT), yang berujung ricuh. *Justice, Peace, and Integrity of Creation* dari *Ordo Fratrum Minorum* (JPIC OFM) Indonesia mengungkapkan sejumlah warga menjadi korban tindakan represif aparat gabungan TNI, Polri, dan Satpol PP. Pada aksi itu, sejumlah warga ditangkap, termasuk Pemimpin Redaksi (Pemred) Flores Herry Kabut.¹³ Namun kejadian ini belum mampu membuktikan bahwa apakah memang benar terdapat pihak yang dikorbankan terkait proyek geotermal yang hendak dibangun di daerah Poco Léok tersebut. Akan tetapi kejadian ini memperlihatkan bahwa proyek energi yang diklaim ramah lingkungan justru berpotensi menimbulkan korban sosial di tingkat lokal.

Kasus Poco Leok menjadi penting untuk dikaji karena memperlihatkan wajah nyata konflik pembangunan di Indonesia Timur. Pemerintah memandang proyek geotermal sebagai bagian dari kepentingan pembangunan nasional dan transisi energi bersih, sedangkan masyarakat lokal melihat proyek tersebut sebagai ancaman terhadap keberlanjutan hidup mereka. Dalam situasi ini, masyarakat yang menolak proyek sering kali dicap sebagai kelompok anti pembangunan dan penghambat kemajuan ekonomi. Akibatnya, masyarakat lokal rentan diposisikan sebagai pihak yang disalahkan atas terhambatnya proyek pembangunan nasional. Konflik tersebut memperlihatkan bahwa pembangunan energi tidak hanya berkaitan dengan persoalan ekonomi dan teknologi, tetapi juga menyangkut keadilan sosial dan ekologis. Oleh karena itu, konflik geotermal di Poco Leok tidak dapat dipahami hanya melalui pendekatan ekonomi-politik pembangunan semata,

¹³ Ambrosius Ardin, "Demo Tolak Geotermal Poco Leok Ricuh, Warga Jadi Korban Kekerasan Aparat", dalam *Detikbali*, <https://www.detik.com/bali/nusra/d-7569376/demo-tolak-geotermal-poco-leok-ricuh-warga-jadi-korban-kekerasan-aparat>, diakses pada 11 November 2024.

melainkan juga membutuhkan refleksi etis dan teologis yang lebih mendalam. Dalam konteks inilah Teologi Publik menjadi perspektif yang relevan untuk membaca persoalan konflik pembangunan geotermal di Poco Leok.

Teologi Publik merupakan model pendekatan teologi yang menempatkan iman Kristen dalam dialog dengan persoalan-persoalan publik seperti politik, ekonomi, hak asasi manusia, kemiskinan, dan krisis ekologis. Teologi tidak hanya dipahami sebagai refleksi iman internal Gereja, tetapi juga sebagai suara moral yang hadir di tengah realitas sosial masyarakat. Max L. Stackhouse menyebutnya sebagai upaya menerjemahkan iman ke dalam bahasa publik yang dapat dipahami oleh semua orang.¹⁴ Teologi publik berfungsi untuk menghadirkan suara profetis Gereja terhadap persoalan masyarakat. Dengan demikian teologi publik dapat didefinisikan sebagai sebuah pendekatan teologi yang bukan hanya berfokus pada ranah privat atau internal Gereja, melainkan juga berhubungan dengan ruang publik, baik sosial, politik, ekonomi, budaya, maupun ekologis. David Tracy menyebut teologi publik sebagai “teologi yang berbicara tidak hanya kepada komunitas iman, tetapi juga kepada masyarakat luas dalam ruang diskursus publik.”¹⁵ Hal ini menegaskan bahwa teologi publik menghadirkan refleksi iman dalam percakapan dengan isu-isu kemanusiaan dan keadilan. Sementara itu, Johann Baptist Metz melalui teologi politik yang ia kembangkan, menempatkan *memoria passionis* (ingatan akan penderitaan) sebagai inti dari iman Kristen yang bersifat publik. Dalam pandangan Metz, iman Kristen tidak dapat direduksi menjadi urusan pribadi yang berfokus pada keselamatan individual, melainkan harus dihadirkan di tengah realitas sosial dan politik yang konkret. Karena itu, Metz menekankan perlunya *deprivatisasi iman*, yakni mengembalikan iman Kristen ke ruang publik agar dapat berfungsi sebagai kekuatan etis dan profetis yang menanggapi penderitaan manusia di dalam sejarah.¹⁶ Dengan menempatkan “memori penderitaan” sebagai pusat refleksi teologis, Metz berusaha membangun suatu *hermeneutika bahaya* (*politische Hermeneutik der Gefahr*), di mana iman Kristen

¹⁴ Max L. Stackhouse, *Public Theology and Political Economy: Christian Stewardship in Modern Society* (Lanham, MD: University Press of America, 1991), hlm. 31.

¹⁵ David Tracy, *The Analogical Imagination: Christian Theology and the Culture of Pluralism* (New York: Crossroad, 1981), hlm. 3.

¹⁶ James Matthew Ashley, *Interruptions: Mysticism, Politics, and Theology in the Work of Johann Baptist Metz* (Notre Dame, IN: University of Notre Dame Press, 1998), hlm. 103.

dihadapkan pada pengalaman konkret penderitaan umat manusia.¹⁷ Ashley menjelaskan bahwa posisi ini membuat teologi Metz menjadi “antropologi praksis-politik”, yakni suatu cara berteologi yang berangkat dari pengalaman manusia sebagai subjek yang rapuh dan terluka dalam sejarah, namun tetap dipanggil untuk bertindak secara solidaristik dan penuh harapan.¹⁸ Bagi Metz, “memori penderitaan” bukan sekadar ingatan historis, melainkan tindakan iman yang bersifat politis dan publik, suatu bentuk kesaksian terhadap Allah yang hadir di tengah korban dan ketidakadilan. Melalui *memoria passionis*, umat beriman diajak untuk memelihara ingatan akan penderitaan Kristus dan para korban sejarah, agar iman tidak jatuh pada privatisasi spiritual, tetapi menjadi daya transformasi sosial demi kemanusiaan universal. Namun, teologi publik tidak cukup berhenti pada pengakuan terhadap penderitaan (*memoria passionis*). Dalam pandangan Johann Baptist Metz, ingatan akan penderitaan Kristus harus dilihat bukan sekadar sebagai refleksi historis atau sikap belas kasih pribadi, tetapi sebagai daya kritis yang mampu mengguncang kesadaran sosial dan membuka ruang bagi tindakan transformatif.

James Matthew Ashley menjelaskan bahwa hanya *memoria passionis, mortis et resurrectionis Jesu Christi*, ingatan akan penderitaan, kematian, dan kebangkitan Yesus Kristus yang dapat memutus logika modernitas yang cenderung menyingkirkan penderitaan dari kesadaran publik. Dengan demikian, *memoria passionis* harus selalu dibaca dalam horizon kebangkitan (*memoria resurrectionis*), sebab dari sanalah lahir harapan dan daya pembaruan sosial yang konkret.¹⁹ Dalam konteks ini, *compassio* (belas kasih) tidak dimengerti sebagai perasaan sentimental atau empati pasif, melainkan sebagai bentuk praksis yang berakar pada solidaritas. Ashley menegaskan bahwa dalam solidaritas, ingatan (*memory*) dan kisah (*narrative*) memperoleh bentuk praksis yang nyata secara mistik-politik (*mystical-political praxis*).²⁰ Artinya, *compassio* berfungsi sebagai komitmen kolektif untuk membela para korban, memulihkan martabat manusia, dan menuntut perubahan struktur sosial yang menindas. Dengan demikian, *memoria passionis* yang diterangi

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 170.

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 118.

²⁰ *Ibid.*, hlm. 152.

oleh *memoria resurrectionis* menjadi sumber bagi teologi publik yang tidak berhenti pada refleksi penderitaan, tetapi bergerak menuju tindakan pembebasan dan transformasi sosial yang berlandaskan iman akan kebangkitan.

Hal ini menegaskan bahwa teologi tidak boleh mengabaikan realitas penderitaan korban sejarah. Sebaliknya, teologi harus menjadi daya kritik terhadap tatanan sosial yang menindas. Selain itu, Jürgen Moltmann melalui teologi harapan menekankan bahwa janji eskatologis Allah harus dihidupi secara konkret dalam praksis sosial-politik yang berpihak pada masa depan umat manusia.²¹ Di sini tampak jelas bahwa janji eskatologis mesti menjadi nyata dalam seluruh aspek kehidupan umat manusia.

Teologi publik juga memberikan kerangka kerja yang penting untuk memahami peran moral masyarakat dan Gereja dalam menghadapi isu-isu seperti yang terjadi pada proyek geotermal di Poco Leok. Melalui pendekatan teologis, penelitian ini dapat mengeksplorasi bagaimana nilai-nilai keadilan dan solidaritas dapat digunakan untuk mendukung masyarakat yang terpinggirkan, serta membangun advokasi yang efektif untuk memperjuangkan hak-hak masyarakat sekaligus sebagai umat Allah. Selain itu, teologi publik juga berfungsi untuk menghadirkan suara profetis Gereja dan masyarakat sipil dalam menghadapi konflik sosial.

Joel Hodge dalam konferensi teologi publik di Ledalero menekankan pentingnya keberpihakan pada korban dalam budaya modern.²² Teologi publik tidak hanya berbicara dalam ruang akademis, melainkan juga hadir di ruang publik untuk membela hak asasi manusia, solidaritas sosial, dan keadilan ekologis. Dalam kasus Poco Leok, teologi publik dapat menjadi dasar untuk membangun advokasi terhadap korban proyek geotermal. Gereja dan masyarakat sipil perlu mengambil

²¹ Jürgen Moltmann, *Theology of Hope: On the Ground and the Implications of a Christian Eschatology* (London: SCM Press, 2021), hlm. 21.

²² Dr. Joel Hodge "Doing Public Theology Today : The Victim in Modernity and the Return of the Sacred" Australian Catholic University, dalam Konferensi Internasional Teologi Publik untuk Konteks Indonesia yang di Selenggarakan Oleh Institut Filsafata dan Teknologi Kreatif Ledalero, Indonesia 27-28 September 2024, hlm. 15.

posisi moral untuk menolak segala bentuk kekerasan, membela hak masyarakat, serta mencari alternatif pembangunan yang berkeadilan.

Dalam perkembangan teologi kontemporer, persoalan ekologis semakin dipahami sebagai bagian integral dari refleksi iman Kristen. Leonardo Boff menegaskan bahwa krisis ekologis modern lahir dari cara pandang manusia yang eksploitatif terhadap alam.²³ Oleh karena itu, Gereja dipanggil untuk membangun spiritualitas ekologis yang menghormati kehidupan dan menjaga keberlanjutan ciptaan. Lebih lanjut perhatian Gereja terhadap persoalan ekologis tampak jelas dalam Ensikliki *Laudato Si* yang ditulis oleh Paus Fransiskus. Dalam dokumen tersebut, Paus Fransiskus menegaskan bahwa krisis ekologis dan krisis sosial merupakan dua realitas yang saling berkaitan.²⁴ Kerusakan lingkungan hidup selalu berdampak langsung terhadap kehidupan manusia, terutama kelompok masyarakat miskin dan rentan. Oleh karena itu, penyelamatan lingkungan harus disertai perjuangan menegakkan keadilan sosial.

Paus Fransiskus juga memperkenalkan konsep “ekologi integral,” yaitu cara pandang yang melihat keterkaitan erat antara manusia, alam, budaya, ekonomi, dan kehidupan sosial secara menyeluruh.²⁵ Pendekatan ini sangat relevan untuk membaca konflik geotermal di Poco Leok karena persoalan yang terjadi tidak hanya berkaitan dengan lingkungan hidup, tetapi juga menyangkut identitas budaya masyarakat adat dan keberlanjutan ruang hidup mereka. Dalam konteks tersebut, Gereja tidak dapat bersikap netral terhadap konflik ekologis yang terjadi di tengah masyarakat. Gereja dipanggil untuk menjalankan tugas profetisnya melalui keterlibatan pastoral yang berpihak pada keberlanjutan hidup manusia dan kelestarian ciptaan. Oleh karena itu, pastoral Gereja tidak lagi cukup dipahami hanya sebagai pelayanan liturgis dan sakramental, tetapi juga sebagai keterlibatan nyata dalam perjuangan keadilan sosial-ekologis.

Karya pastoral ekologis menjadi penting dalam konteks krisis ekologis dan konflik pembangunan modern. Pastoral ekologis dipahami sebagai bentuk

²³ Leonardo Boff, *Cry of the Earth, Cry of the Poor* (Maryknoll: Orbis Books, 1997), hlm. 15.

²⁴ Paus Fransiskus. *Ensiklik Laudato Si*, penerj. Martin Harun OFM (Jakarta: Penerbit Obor, 2015), hlm. 34.

²⁵ *Ibid.*, hlm. 106.

pelayanan Gereja yang berfokus pada perlindungan lingkungan hidup, kesadaran ekologis umat, pendampingan masyarakat korban kerusakan lingkungan, serta perjuangan menegakkan keadilan sosial-ekologis. Dengan demikian, pastoral ekologis merupakan bentuk konkret kehadiran Gereja di tengah persoalan sosial dan ekologis masyarakat. Dalam konteks konflik geotermal di Poco Leok, pastoral ekologis dapat menjadi bentuk kehadiran Gereja yang tidak hanya memberikan pendampingan spiritual, tetapi juga advokasi sosial, pendidikan ekologis, dan penguatan solidaritas masyarakat. Gereja dipanggil untuk menjadi mediator dialog, pembela martabat manusia, sekaligus suara profetis yang memperjuangkan keadilan ekologis di tengah konflik pembangunan.

Penelitian tentang proyek geotermal di Indonesia telah cukup banyak dilakukan. Salah satunya adalah penelitian yang dilakukan oleh Rivaldus Agung, Abdul Malik Iskandar, Sriwahyuni, dan Kasman Sinring (2024)²⁶ tentang Konflik Sosial Antara Masyarakat Wae Sano dan Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat Provinsi Nusa Tenggara Timur (Studi Kontradiksi PT.Geo Dipa Energi Tambang Panas Bumi Geotermal). Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Metode ini memungkinkan peneliti untuk memahami fenomena sosial dari perspektif subjek yang diteliti, dalam hal ini masyarakat Wae Sano. Melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, peneliti dapat mengumpulkan data yang mendalam mengenai latar belakang dan bentuk konflik sosial yang terjadi antara masyarakat dan pemerintah. Secara keseluruhan, metode kualitatif yang digunakan dalam penelitian ini sangat efektif dalam mengungkap kompleksitas konflik sosial antara masyarakat Wae Sano dan pemerintah. Meskipun memiliki kekurangan, seperti potensi subjektivitas dan keterbatasan dalam generalisasi, kelebihan yang ditawarkan oleh pendekatan ini terutama pemahaman mendalam terhadap konteks sosial membuatnya sangat sesuai untuk studi ini. Penelitian ini berhasil memberikan gambaran yang komprehensif tentang dinamika

²⁶ Rivaldus Agung dkk., 'Konflik Sosial Antara Masyarakat Wae Sanodan Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat Provinsi Nusa Tenggara Timur (Studi Kontradiksi PT . Geo Dipa Energi Tambang Panas Bumi Geotermal)', *Jurnal Sosial Dan Humaniora*, 2:1 (Yogyakarta, 1 Agustus 2024), hlm. 1–11.

konflik dan pandangan masyarakat terhadap proyek geothermal, serta tantangan yang dihadapi dalam proses komunikasi antara pemerintah dan masyarakat.

Penelitian lainnya dilakukan oleh Eril Sastra Hadi dan Eka Vidya Putra (2019)²⁷ tentang Resistensi Masyarakat Terhadap Rencana Pembangunan PLTP (Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi) di Gunung Talang Kabupaten Solok. Penelitian ini berhasil mengidentifikasi faktor-faktor utama yang melatarbelakangi resistensi masyarakat, yaitu pengetahuan, ekonomi, dan sosial budaya. Hal ini memberikan wawasan komprehensif mengenai alasan masyarakat menolak proyek PLTP. Penelitian ini juga memaparkan dengan rinci bagaimana nilai-nilai budaya Minangkabau, seperti kepemilikan tanah ulayat, menjadi penghambat penerimaan inovasi. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat sensitivitas terhadap konteks sosial-budaya lokal. Selain itu, hasil dalam penelitian ini menunjukkan bahwa kurangnya sosialisasi yang menyeluruh berperan besar dalam menumbuhkan resistensi masyarakat. Hal ini menjadi masukan penting bagi kebijakan proyek serupa di masa depan. Hasil dan metode penelitian ini memberikan wawasan penting mengenai resistensi masyarakat terhadap pembangunan PLTP dengan mengungkapkan faktor-faktor utama yang berkontribusi terhadap penolakan. Meski demikian, keterbatasan dalam generalisasi, sampel, dan pendekatan sosialisasi menunjukkan bahwa ada ruang untuk perbaikan dalam penelitian sejenis di masa depan.

Herawan Sauni, Zico Junius Fernando, dan Septa Candra (2022)²⁸ melakukan penelitian tentang energi geotermal dalam aturan, masalah lingkungan hidup dan solusi penyelesaian konflik di masyarakat. Melalui pendekatan hukum normatif, penelitian ini menunjukkan bahwa peraturan yang ada masih memerlukan penyempurnaan untuk menciptakan keseimbangan antara pengembangan energi dan perlindungan lingkungan. Penelitian juga menemukan bahwa meskipun Indonesia memiliki potensi geotermal yang sangat besar, hanya sebagian kecil yang telah dimanfaatkan. Hal ini mengindikasikan perlunya strategi yang lebih baik dan

²⁷ Eril Sastra Hadi dan Eka Vidya Putra, "Resistensi Masyarakat Terhadap Rencana Pembangunan PLTP (Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi) Di Gunung Talang Kabupaten Solok", *Jurnal Perspektif*, 2:3 (Padang: Agustus 2019), hlm. 234-242.

²⁸ Herawan Sauni., Zico Junius Fernando, dan Septa Candra, "Energi Geothermal Dalam Aturan, Masalah Lingkungan Hidup Dan Solusi Penyelesaian Konflik Di Masyarakat", *Jurnal Rechts Vinding*, 11:3 (Jakarta: Desember 2022), hlm. 373-390.

kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan pihak swasta. Salah satu kelebihan dari pengembangan energi geothermal adalah potensi untuk mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil. Energi geothermal merupakan sumber energi terbarukan yang dapat memberikan pasokan listrik yang stabil dan berkelanjutan. Selain itu, dengan pengelolaan yang baik, energi geothermal dapat menjadi sumber pendapatan bagi negara dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal melalui penciptaan lapangan kerja dan pengembangan infrastruktur. Di sisi lain, pengembangan energi geothermal juga memiliki beberapa kekurangan. Risiko kerusakan lingkungan, seperti pengeluaran limbah berbahaya dan gangguan terhadap ekosistem lokal, merupakan tantangan yang serius. Selain itu, proses litigasi yang panjang dan konflik dengan masyarakat lokal dapat menghambat kemajuan proyek. Kelemahan dalam proyek ini terdapat pada sosialisasi dan mitigasi. Dampak dari proyek-proyek ini juga dapat menyebabkan kesalahpahaman dan penolakan dari masyarakat.

Penelitian lainnya dilakukan oleh Silfanus Jemadin (2024)²⁹. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang memungkinkan peneliti untuk mendalami perspektif masyarakat lokal. Melalui analisis deskriptif, penulis berhasil menghadirkan suara dan pengalaman masyarakat yang sering terpinggirkan dalam diskusi pembangunan. Penelitian ini sangat relevan dengan konteks sosial dan politik saat ini, di mana banyak proyek pembangunan menghadapi penolakan dari masyarakat yang merasa terancam oleh dampak negatifnya. Hal ini memberikan kontribusi penting bagi diskusi tentang keadilan sosial dan hak asasi manusia. Penelitian ini membahas dilema pengembangan geothermal di Flores Manggarai, dengan fokus pada konflik antara kepentingan pembangunan dan keberlanjutan lingkungan. Penulis menyajikan berbagai argumen yang menunjukkan bahwa pengembangan geothermal sering kali membawa dampak negatif lebih besar dibandingkan dengan manfaatnya bagi masyarakat lokal. Dalam konteks ini, hasil penelitian mengindikasikan bahwa masyarakat di Poco Léok dan Sano Nggoang menolak proyek-proyek geothermal karena khawatir akan kerusakan ekologi dan dampak sosial yang ditimbulkan, seperti bencana alam yang dapat merusak tempat

²⁹ Silfanus Jemadin, "Dilemma of Geothermal Development in Flores Manggarai : Blessing or Curse ?", *Jurnal Ilmu Sosial, Politik & Humaniora*, 7:2 (Bandung: September 2024), hlm. 34–45.

tinggal dan sumber mata pencaharian mereka. Secara keseluruhan, penelitian ini memberikan wawasan penting tentang dilema pengembangan geotermal di Flores Manggarai. Meskipun ada beberapa kekurangan, seperti kurangnya data empiris dan analisis yang lebih seimbang, hasil yang diperoleh tetap relevan dan memberikan kontribusi pada pemahaman tentang interaksi antara pembangunan dan ekologi. Penelitian ini menekankan pentingnya melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan terkait proyek pembangunan, agar hasilnya dapat lebih berkelanjutan dan sesuai dengan kebutuhan lokal.

Penelitian-penelitian terdahulu mengenai proyek geotermal di Indonesia menunjukkan bahwa upaya energi panas bumi, meskipun dipandang sebagai solusi strategis terhadap krisis dan perubahan iklim, sering kali memunculkan konflik sosial yang kompleks di tingkat lokal. Studi-studi di Wae Sano, Gunung Talang, dan Poco Leok memperlihatkan bahwa resistensi masyarakat umumnya berakar pada faktor sosial-budaya, ekonomi, dan ekologis, terutama terkait tanah ulayat, kurangnya sosialisasi, serta kekhawatiran terhadap kerusakan lingkungan dan hilangnya identitas budaya. Di sisi lain, penelitian hukum dan lingkungan menegaskan bahwa regulasi yang ada belum sepenuhnya mampu menciptakan keseimbangan antara kepentingan pembangunan energi dan perlindungan masyarakat maupun alam. Dalam konteks tersebut, terlihat bahwa konflik pembangunan geotermal bukan sekadar persoalan teknis atau ekonomi, melainkan mencerminkan dinamika sosial yang lebih dalam yakni ketegangan antara pembangunan nasional dan keberlanjutan lokal. Walaupun demikian, penelitian-penelitian sebelumnya, umumnya lebih berfokus pada aspek sosial, hukum, ekonomi, dan lingkungan. Belum banyak penelitian yang secara khusus menganalisis konflik geotermal dalam perspektif Teologi Publik dan menghubungkannya dengan pengembangan karya pastoral ekologis Gereja. Maka dari itu, penelitian ini memiliki kebaruan dalam upayanya mempertemukan refleksi teologis dengan realitas konflik ekologis konkret di Poco Leok.

Penelitian ini berangkat dari keyakinan bahwa konflik geotermal di Poco Leok bukan hanya persoalan pembangunan energi, melainkan juga persoalan moral, sosial, budaya, dan ekologis yang menuntut tanggung jawab bersama. Melalui perspektif Teologi Publik, penelitian ini hendak menunjukkan bahwa Gereja

memiliki tanggung jawab moral untuk menghadirkan solidaritas, dialog, advokasi, dan pendampingan pastoral terhadap masyarakat yang terdampak konflik ekologis. Dengan demikian, refleksi teologis tidak berhenti pada tataran konseptual, tetapi bergerak menuju praksis pastoral yang kontekstual, profetis, dan transformatif.

Berdasarkan uraian latar belakang ini, dapat dilihat bahwa proyek pengembangan energi panas bumi geotermal di Poco Leok tidak hanya menghadirkan persoalan teknis mengenai kebutuhan energi nasional, tetapi juga memunculkan persoalan sosial, ekologis, budaya, politik, dan pastoral yang kompleks. Proyek geotermal yang pada tingkat nasional dipandang sebagai bagian dari strategi transisi energi bersih dan pembangunan berkelanjutan, pada tingkat lokal justru menimbulkan penolakan dan konflik berkepanjangan di tengah masyarakat adat Poco Leok. Situasi ini memperlihatkan adanya ketegangan antara kepentingan pembangunan nasional dengan keberlanjutan ruang hidup masyarakat lokal.

Konflik yang muncul dalam proyek geotermal Poco Leok menunjukkan bahwa pembangunan energi terbarukan tidak selalu berjalan seiring dengan prinsip keadilan sosial dan ekologis. Di satu sisi, pemerintah dan pihak pengembang memandang proyek geotermal sebagai kebutuhan strategis untuk memenuhi target energi nasional dan mendukung pengurangan emisi karbon. Namun di sisi lain, sebagian masyarakat Poco Leok memandang proyek tersebut sebagai ancaman terhadap tanah ulayat, identitas budaya, kelestarian lingkungan hidup, sumber air, dan keberlangsungan hidup masyarakat adat. Perbedaan cara pandang ini kemudian melahirkan ketegangan sosial yang semakin meluas.

Selain itu, konflik geotermal di Poco Leok juga memperlihatkan adanya persoalan relasi kuasa dalam proses pembangunan. Masyarakat lokal sering kali merasa tidak dilibatkan secara penuh dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut ruang hidup mereka. Situasi ini menimbulkan ketidakpercayaan terhadap pemerintah dan pihak perusahaan serta melahirkan kecurigaan bahwa pembangunan lebih mengutamakan kepentingan ekonomi dan politik dibanding keselamatan ekologis masyarakat. Dalam konteks tersebut, masyarakat yang menolak proyek sering dicap sebagai kelompok anti pembangunan, penghambat

kemajuan, bahkan dianggap melawan kepentingan negara. Keadaan ini memperlihatkan adanya kecenderungan marginalisasi terhadap masyarakat adat dalam dinamika pembangunan modern.

Persoalan lain yang turut muncul ialah adanya konflik sosial dan ketegangan horizontal di tengah masyarakat akibat perbedaan sikap terhadap proyek geotermal. Konflik tersebut memperlihatkan bahwa pembangunan modern dapat memunculkan persoalan kemanusiaan, keadilan sosial, dan kerentanan ekologis yang berdampak langsung terhadap masyarakat lokal. Dengan demikian, konflik geotermal di Poco Leok tidak dapat dipahami hanya sebagai persoalan pembangunan energi, tetapi juga sebagai persoalan etis, sosial, ekologis, dan pastoral.

Situasi tersebut memperlihatkan pentingnya pendekatan Teologi Publik dalam membaca konflik pembangunan ekologis. Selama ini, pembahasan mengenai proyek geotermal lebih banyak dilakukan dari perspektif teknis, hukum, ekonomi, dan kebijakan publik. Sementara itu, pendekatan Teologi Publik yang melihat relasi antara iman, keadilan sosial, ruang publik, dan tanggung jawab moral Gereja masih relatif kurang digunakan dalam membaca konflik geotermal di Poco Leok. Padahal, Teologi Publik memiliki relevansi penting dalam membangun refleksi iman yang kontekstual terhadap penderitaan masyarakat dan persoalan ekologis.

Di samping itu, konflik geotermal Poco Leok juga memperlihatkan perlunya refleksi yang lebih mendalam mengenai peran Gereja dalam menghadapi krisis sosial-ekologis. Gereja tidak hanya dipanggil untuk menjalankan pelayanan spiritual dan liturgis, tetapi juga menghadirkan sikap profetis dalam memperjuangkan keadilan, perdamaian, dan keutuhan ciptaan. Dalam konteks ini, pastoral ekologis menjadi bentuk konkret keterlibatan Gereja dalam mendampingi masyarakat yang terdampak konflik pembangunan dan kerusakan lingkungan hidup. Namun demikian, model pastoral ekologis yang kontekstual dan relevan dengan situasi konflik geotermal di Poco Leok masih membutuhkan refleksi dan pengembangan lebih lanjut.

Berdasarkan berbagai persoalan tersebut, penelitian ini memandang bahwa konflik proyek geotermal di Poco Leok perlu dianalisis secara lebih mendalam

dalam perspektif Teologi Publik untuk melihat relasi antara pembangunan, keadilan ekologis, penderitaan masyarakat, dan tanggung jawab sosial Gereja. Selain itu, penelitian ini juga berupaya merumuskan implikasi pastoral ekologis yang dapat menjadi bentuk konkret kehadiran Gereja dalam menghadapi konflik sosial-ekologis di Poco Leok. Oleh karena itu, penulis meramu tesis ini dengan berpayung di bawah judul: **ANALISIS KONFLIK PROYEK GEOTERMAL DI POCO LEOK DALAM PERSPEKTIF TEOLOGI PUBLIK DAN IMPLIKASINYA BAGI KARYA PASTORAL EKOLOGIS.**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah utama dalam penelitian ini antara lain. *Pertama*, bagaimana konflik proyek geotermal di Poco Leok dalam perspektif Teologi Publik? *Kedua*, apa implikasi konflik proyek geotermal di Poco Leok bagi pengembangan karya pastoral ekologis Gereja? Selain masalah utama tersebut, masalah turunan yang hendak dijawab dalam penelitian ini antara lain. *Pertama*, apa yang dimaksudkan dengan Teologi Publik dan Pastoral Ekologis? *Kedua*, siapa itu masyarakat Poco Leok? *Ketiga*, konflik seperti apa yang terjadi berkaitan dengan proyek Geotermal di Poco Leok? *Keempat*, Bagaimana dinamika konflik proyek geotermal di Poco Leok dalam kaitannya dengan persoalan sosial, ekologis, budaya, dan relasi kekuasaan antara masyarakat adat, pemerintah, dan pihak pengembang?

1.3 Tujuan Penelitian

1.3.1 Tujuan Umum

Tujuan utama dari penelitian ini ialah sebagai berikut. *Pertama*, memahami konflik proyek geotermal di Poco Leok dalam perspektif teologi Publik. *Kedua*, menjelaskan implikasi konflik proyek geotermal di Poco Leok bagi pengembangan karya pastoral ekologis Gereja. Selain tujuan utama tersebut, adapun tujuan lain yang berkaitan dengan tujuan utama tersebut ialah sebagai berikut. *Pertama*, mendeskripsikan konsep Teologi Publik dan Pastoral Ekologis. *Kedua*, mendeskripsikan masyarakat Poco Leok. *Ketiga*, mendeskripsikan konflik seperti apa yang terjadi berkaitan dengan proyek geotermal di Poco Leok. *Keempat*,

menganalisis dinamika konflik proyek geotermal di Poco Leok dalam kaitannya dengan persoalan sosial, ekologis, budaya, serta relasi kekuasaan yang terjadi antara masyarakat adat, pemerintah, dan pihak pengembang.

1.3.2 Tujuan Khusus

Tujuan akademis penulisan tesis ini mengacu pada visi dan misi program pendidikan pascasarjana teologi Katolik di Institut Filsafat dan Teknologi Kreatif (IFTK) Ledalero. Bertolak dari visi tersebut, maka penelitian ini dibuat dengan tujuan untuk menghasilkan magister teologi dan petugas pastoral yang terpercaya dan berintegritas secara intelektual, sosial, dan spiritual. Atas dasar visi tersebut, maka penelitian ini dibuat dengan tujuan untuk memenuhi salah satu persyaratan untuk meraih gelar magister teologi (M.Th) dengan pendekatan kontekstual di IFTK Ledalero.

1.4 Manfaat Penelitian

Penulisan tesis ini diharapkan memberikan manfaat untuk berbagai pihak, baik secara teoretis maupun praktis, antara lain: *Pertama*, bagi pengembangan ilmu teologi. Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya refleksi teologi, khususnya dalam bidang Teologi Publik dan pastoral ekologis, terutama dalam membaca persoalan konflik sosial-ekologis yang muncul akibat proyek pembangunan energi terbarukan. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi sumbangan akademis bagi pengembangan kajian tentang relasi antara Gereja, masyarakat, pembangunan, dan keadilan ekologis dalam konteks Indonesia, khususnya di Poco Leok. *Kedua*, bagi Gereja lokal. Penelitian ini menjadi bahan refleksi dan inspirasi bagi Gereja lokal dalam mengembangkan sikap profetis dan pastoral yang berpihak kepada korban ketidakadilan sosial. Gereja diharapkan semakin menyadari panggilannya untuk tidak diam di tengah penderitaan umat, tetapi aktif mengambil bagian dalam perjuangan keadilan, perdamaian, dan pelestarian ciptaan. *Ketiga*, bagi masyarakat sipil dan lembaga sosial. Penelitian ini menyediakan dasar teologis dan moral untuk mendukung advokasi sosial terhadap korban pembangunan, khususnya dalam proyek-proyek energi terbarukan seperti geotermal. *Keempat*, bagi pemerintah dan pemangku kebijakan. Penelitian ini diharapkan memberikan rekomendasi konstruktif bagi perumusan kebijakan pembangunan energi yang lebih

adil, partisipatif, dan berkelanjutan. Pemerintah dapat menggunakan hasil penelitian ini untuk melihat pentingnya menghormati hak masyarakat lokal serta memperhatikan dimensi sosial dan budaya dalam setiap proyek pembangunan. *Kelima*, bagi masyarakat Poco Leok, penelitian ini diharapkan dapat membantu memperjelas persoalan konflik geotermal serta mendorong kesadaran akan pentingnya dialog, keadilan ekologis, dan perlindungan hak-hak masyarakat adat. *Keenam*, bagi masyarakat umum dan Kaum akademisi. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi penelitian-penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan konflik ekologis, pembangunan energi terbarukan, Teologi Publik, dan pastoral ekologis.

1.5 Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis. Metode ini dipilih karena penelitian berusaha memahami dan menganalisis konflik proyek geotermal di Poco Leok dalam perspektif Teologi Publik serta implikasinya bagi karya pastoral ekologis Gereja. Pendekatan kualitatif memungkinkan penulis untuk memahami realitas sosial, pengalaman masyarakat, dinamika konflik, serta refleksi teologis secara lebih mendalam dan kontekstual.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan masyarakat Poco Leok, tokoh adat, aktivis, pihak Gereja, serta pihak-pihak lain yang terkait dengan konflik proyek geotermal. Selain itu, penulis juga melakukan observasi terhadap situasi sosial masyarakat dan dinamika konflik yang terjadi di Poco Leok. Sementara itu, data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan berupa buku-buku, artikel ilmiah, dokumen Gereja, dokumen kebijakan pemerintah, berita, serta tulisan-tulisan yang berkaitan dengan geotermal, konflik ekologis, Teologi Publik, dan pastoral ekologis.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui tiga tahap, yakni studi pustaka, wawancara, dan observasi. Studi pustaka digunakan untuk membangun kerangka teoritis mengenai Teologi Publik dan pastoral ekologis. Wawancara digunakan untuk memperoleh gambaran konkret mengenai pengalaman dan pandangan masyarakat terhadap proyek geotermal di Poco Leok. Observasi dilakukan untuk

melihat secara langsung kondisi sosial-ekologis masyarakat dan dampak konflik yang terjadi.

Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara deskriptif-analitis dengan langkah-langkah: mengumpulkan data, mengklasifikasikan data berdasarkan tema-tema penelitian, mendeskripsikan dinamika konflik sosial-ekologis, lalu menganalisisnya dalam perspektif Teologi Publik. Dari analisis tersebut, penulis kemudian merumuskan implikasi pastoral ekologis bagi Gereja dalam menghadapi konflik pembangunan dan persoalan keadilan ekologis.

1.6 Keterbatasan Studi

Dalam penulisan tesis ini, penulis menyadari bahwa studi mengenai konflik proyek geotermal di Poco Leok dalam perspektif Teologi Publik dan implikasinya bagi karya pastoral ekologis memiliki sejumlah keterbatasan. Keterbatasan-keterbatasan tersebut perlu disadari agar penelitian ini dapat dipahami secara proporsional dan tetap terbuka bagi pengembangan penelitian selanjutnya. *Pertama*, penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang sangat bergantung pada data lapangan, pengalaman informan, dan sumber-sumber tertulis yang tersedia. Karena itu, hasil penelitian ini tidak dimaksudkan untuk menghasilkan generalisasi universal mengenai seluruh konflik geotermal di Indonesia, melainkan lebih diarahkan pada pemahaman mendalam terhadap konteks konflik yang terjadi di Poco Leok. Dengan demikian, penelitian ini lebih menekankan kedalaman analisis daripada luasnya cakupan penelitian. *Kedua*, penelitian ini dilakukan dalam situasi konflik sosial yang masih terus berkembang. Dinamika konflik proyek geotermal di Poco Leok bersifat dinamis karena melibatkan berbagai pihak dengan kepentingan, pandangan, dan sikap yang berbeda-beda. Situasi tersebut memungkinkan adanya perubahan data, sikap masyarakat, maupun perkembangan kebijakan selama proses penelitian berlangsung. Oleh sebab itu, penelitian ini hanya memotret realitas konflik berdasarkan situasi dan data yang diperoleh pada waktu penelitian dilakukan. *Ketiga*, keterbatasan waktu, akses, dan kondisi lapangan turut memengaruhi proses pengumpulan data. Tidak semua pihak yang terlibat dalam konflik dapat diwawancarai secara mendalam. Selain itu, adanya sensitivitas sosial dan ketegangan di tengah masyarakat membuat beberapa

informan tidak sepenuhnya terbuka dalam menyampaikan pandangan mereka. Karena itu, penulis menyadari bahwa masih terdapat kemungkinan adanya data atau perspektif tertentu yang belum sepenuhnya terakomodasi dalam penelitian ini. *Keempat*, penelitian ini lebih berfokus pada analisis teologis dan pastoral terhadap konflik proyek geotermal di Poco Leok. Oleh karena itu, penelitian ini tidak membahas secara teknis aspek geologi, rekayasa energi, maupun analisis ekonomi proyek geotermal secara mendalam. Pembahasan mengenai aspek-aspek tersebut hanya digunakan sejauh memiliki relevansi dengan persoalan sosial, ekologis, dan pastoral yang menjadi fokus penelitian. *Kelima*, penelitian ini menggunakan perspektif Teologi Publik dan pastoral ekologis sebagai kerangka analisis utama. Konsekuensinya, penelitian ini lebih menitikberatkan perhatian pada dimensi etis, sosial, ekologis, dan pastoral dari konflik yang terjadi. Perspektif-perspektif lain seperti, pendekatan hukum, politik, ekonomi pembangunan, atau antropologi budaya, tidak dibahas secara mendalam meskipun tetap disinggung dalam bagian-bagian tertentu. Meskipun memiliki berbagai keterbatasan tersebut, penelitian ini tetap diharapkan dapat memberikan kontribusi akademis dan pastoral dalam memahami konflik proyek geotermal di Poco Leok, sekaligus membuka ruang bagi penelitian-penelitian lanjutan yang lebih luas, mendalam, dan interdisipliner mengenai persoalan keadilan ekologis, masyarakat adat, dan peran Gereja dalam ruang

1.7 Sistematika Penulisan

Penulisan tesis ini disusun dan dirinci ke dalam lima bab. Bab I merupakan pendahuluan yang memuat uraian mengenai latar belakang penulisan, latar belakang penelitian, rumusan masalah, studi literatur, tujuan dan manfaat penelitian, metodologi penelitian, keterbatasan studi, serta sistematika penulisan tesis. Bab II berisi uraian tentang konsep-konsep dasar mengenai Teologi Publik dan pastoral ekologis sebagai kerangka analisis penelitian. Bab III berisi gambaran mengenai konteks sosial masyarakat Poco Leok serta dinamika konflik yang muncul akibat proyek geotermal. Bab IV berisi uraian inti kajian yang menganalisis konflik proyek geotermal di Poco Leok menggunakan perspektif Teologi Publik. Analisis tersebut diarahkan untuk melihat persoalan keadilan ekologis, hak-hak masyarakat adat, tanggung jawab sosial Gereja, serta relasi antara pembangunan

dan kesejahteraan bersama. Selain itu, bab ini juga membahas implikasi konflik tersebut bagi pengembangan karya pastoral ekologis Gereja, terutama dalam bidang pendampingan umat, advokasi sosial-ekologis, dan perwujudan peran profetis Gereja di tengah masyarakat. Bab V berisi penutup dan kesimpulan umum dari seluruh pembahasan penelitian serta saran-saran yang dianggap penting berdasarkan hasil analisis penelitian.